



RENCANA KERJA TAHUN 2024

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)
KABUPATEN LAMANDAU**

Alamat: Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Jl. W.R. Supratman No. 051

Telepon (0532) 2071092 Faks. (0532) 2071092

E-mail: bkpsdm@lamandaukab.go.id Kode Pos: 74662

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat Nya, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau merupakan kumpulan rencana yang telah menjadi komitmen bersama dan telah dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap bidang.

Kami berharap Renja PD ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas dibidang kepegawaian serta kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau selama Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Renja PD ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangannya, oleh sebab itu saran dan perbaikan perlu dilakukan agar Rancangan Akhir Renja PD ini dapat disempurnakan dan dapat mengakomodir kegiatan yang ingin dicapai pada tahun 2024.



Mana Bulik, September 2023
Kepala BKPSDM Kabupaten Lamandau,

KAMINI ANTHUS
NIP. 19800612 200312 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM	25
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM.....	26
3.3 Program dan Kegiatan	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM	34
BAB V PENUTUP	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penulisan Rancangan Akhir Renja PD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 adalah :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 06);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 204);
22. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 841);

23. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 889);
24. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 901).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Renja PD BKPSDM Kabupaten Lamandau Tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja PD dan Renja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Lamandau adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh BKPSDM Kabupaten Lamandau;
2. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

- 1. 1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah yang disesuaikan menurut perangkat daerah masing-masing dengan memperhatikan capaian SPM dan Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam Renstra 2024-2026.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Uraian tentang kinerja pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang terjadi pada tahun sebelumnya dan isu atau tantangan terhadap penyelenggaraan tugas fungsi pokok perangkat daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan pokok fungsi perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026.

3.3 Program dan Kegiatan

Diperoleh dari matriks hasil *print out* dari penginputan program dan kegiatan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta nama, tanda tangan Kepala Perangkat Daerah.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu disajikan menggunakan Formulir E.81 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Formulir E.31
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Lamandau
Periode Pelaksanaan : Tahun 2022

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

1. Indeks Profesionalitas ASN : 58
2. Persentase aparatur yang menduduki jabatan pimpinan tinggi Pratama dan administrator yang sesuai standar kompetensi jabatan : 60,75 %
3. Persentase tingkat layanan administrasi kepegawaian : 80 %
4. Persentase ASN yang mengikuti Diklat dan Lulus dengan predikat memuaskan : 78 %

No	Sasaran	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
				5		6		7		8		9		10		11		12= 5+11		13=12/4x100%													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12= 5+11	13=12/4x100%	11													
1		Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	%	12.710.071.687	100	Persen	5.300.853.949	100	Persen	3.547.460.116	18,40	Persen	821.611.536	22	Persen	1.045.081.088	37	Persen	1.169.354.747	77	Persen	3.036.047.377	177	Persen	8.336.901.320	177	%	66	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	42	Bulan	7.273.066.721	14	Bulan	2.764.369.096	14	Bulan	2.515.812.708	3	Bulan	650.080.463	5	Bulan	824.555.673	3	Bulan	864.996.244	11	Bulan	2.339.632.380	25	Bulan	5.104.001.476	60	%	70	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	42	Bulan	7.273.066.721	14	Bulan	2.764.369.096	14	Bulan	2.515.812.708	3	Bulan	650.080.463	5	Bulan	824.555.673	3	Bulan	864.996.244	11	Bulan	2.339.632.380	25	Bulan	5.104.001.476	60	%	70	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penunjang peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur yang tersedia	100	%	428.041.275	100	Persen	63.331.625	100	Persen	36.514.800	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	36.340.000	100	Persen	36.340.000	200	Persen	99.671.625	200	%	23	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	75	Stel	200.811.625	25	Stel	63.331.625	27	Stel	36.514.800	0	Stel	-	0	Stel	0	27	Stel	36.340.000	27	Stel	36.340.000	52	Stel	99.671.625	69	%	50	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Jumlah pakaian khusus tertentu yang tersedia	229	Stel		75	Stel		45	Stel		0	Stel	-	0	Stel	0	45	Stel		45	Stel		120	Stel		52	%		%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah waktu pelaksanaan sosialisasi	3	Kali	227.229.650	0	Kali																								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan pelayanan administrasi umum yang tersedia	100	%	1.692.826.897	100	Persen	564.253.971	100	Persen	329.393.977	25	Persen	70.437.347	25	Persen	81.356.335	25	Persen	76.530.550	75	Persen	228.324.232	175	Persen	792.578.203	175	%	47	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	100	%	19.409.440	100	Persen	23.112.000	100	Persen	10.560.224	25	Persen	2.629.000	25	Persen	2.650.000	25	Persen	5.279.000	75	Persen	10.558.000	175	Persen	33.670.000	175	%	173	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100	%	588.087.295	100	Persen	276.762.512	100	Persen	92.922.379	25	Persen	18.802.000	25	Persen	18.849.000	25	Persen	24.066.000	75	Persen	61.717.000	175	Persen	338.479.512	175	%	58	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase bahan logistik kantor yang tersedia	100	%	94.797.000	100	Persen	20.218.500	100	Persen	25.040.000	25	Persen	3.450.000	25	Persen	4.340.000	25	Persen	15.322.000	75	Persen	23.112.000	175	Persen	43.330.500	175	%	46	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100	%	212.650.212	100	Persen	48.757.000	100	Persen	70.949.374	25	Persen	16.500.000	25	Persen	5.749.300	25	Persen	4.387.200	75	Persen	26.636.500	175	Persen	75.393.500	175	%	35	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	36	Bulan	40.883.000	12	Bulan	13.560.000	12	Bulan	13.566.000	3	Bulan	-	3	Bulan	630.000	3	Bulan	3.450.000	9	Bulan	4.080.000	21	Bulan	17.640.000	58	%	43	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kedalam daerah	36	Bulan	736.999.950	12	Bulan	181.843.959	12	Bulan	116.356.000	3	Bulan	29.056.347	3	Bulan	49.138.035	3	Bulan	24.026.350	9	Bulan	102.220.732	21	Bulan	284.064.691	58	%	39	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik Daerah penunjang operasional perkantoran	100	%	916.461.170	100	Persen	841.805.450																	100	Persen	841.805.450	100	%	92	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	3	Unit	70.500.000																										Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2	Paket	227.623.264	1	Paket	818.875.450																	1	Paket	818.875.450	50	%	360	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1	Paket	322.887.906																										Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	Paket	295.450.000	1	Paket	22.930.000																	1	Paket	22.930.000	100	%	8	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang operasional perkantoran yang tersedia	100	%	1.569.186.394	100	Persen	432.668.357	100	Persen	484.368.081	25,59	Persen	78.462.876	25	Persen	100.289.080	22	Persen	119.707.303	73	Persen	298.459.259	173	Persen	731.127.816	173	%	47	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	1725	Surat	17.525.000	858	Surat	4.920.500	575	Surat	5.500.000	154	Surat	1.500.000	146	Surat	1.152.000	90	Surat	1.000.000	390	Surat	3.652.000	1248	Surat	8.572.500	72	%	49	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, air, listrik dan internet	36	Bulan	847.690.000	12	Bulan	164.823.662	12	Bulan	207.414.500	3	Bulan	34.645.097	3	Bulan	35.939.380	3	Bulan	53.022.459	9	Bulan	123.606.936	21	Bulan	288.430.598	58	%	34	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan tersedianya jasa pelayanan umum kantor	36	Bulan	703.971.394	12	Bulan	262.924.195	12	Bulan	271.453.581	3	Bulan	42.317.779	3	Bulan	63.197.700	3	Bulan	65.684.844	9	Bulan	171.200.323	21	Bulan	434.124.518	58	%	62	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang tersedia	100	%	830.489.230	100	Persen	634.425.450	100	Persen	181.370.550	20	Persen	22.630.850	20	Persen	38.880.000	20	Persen	71.780.650	60	Persen	133.291.500	160	Persen	767.716.950	160	%	92	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah blanko pembayaran pajak kendaraan dinas	69	Blanko Pajak	267.918.000	22	Blanko Pajak	84.323.100	22	Blanko Pajak	88.980.000	0	Blanko Pajak	18.249.350	0	Blanko Pajak	7.848.000	0	Blanko Pajak	37.209.650	0	Blanko Pajak	63.307.000	22	Blanko Pajak	147.630.100	32	%	55	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	36	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		9	Bulan		21	Bulan		58	%		%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin yang terpelihara	100	%	9.000.000	100	Persen	28.500.000	100	Persen	3.000.000	25	Persen	0	25	Persen	0	25	Persen	-	75	Persen	-	175	Persen	28.500.000	175	%	317	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun Lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang di Evaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5			6			7			Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		11			12= 5+11			13=12/4x100%							
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5			6			7			8		8		9		10		11			12= 5+11			13=12/4x100%			11				
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	%	365.720.030	100	Persen	452.332.350	100	Persen	26.970.000	25	Persen	0	25	Persen	25.202.000	25	Persen	1.761.000		75	Persen	26.963.000	175	Persen	479.295.350	175	%	131	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	%	187.851.200	100	Persen	69.270.000	100	Persen	62.420.550	25	Persen	4.381.500	25	Persen	5.830.000	25	Persen	32.810.000		75	Persen	43.021.500	175	Persen	112.291.500	175	%	60	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2	Meningkatnya kualitas administrasi kepegawain	Program Kepegawain Daerah	Persentase Dokumen Kepegawain yang dibuktikan hasil validasi	77	%	5.957.995.915	99	Persen	1.460.665.282	72	Persen	1.346.039.498	1,33	Persen	120.547.854	40	Persen	204.599.629	15	Persen	150.962.278		56	Persen	476.109.761	155	Persen	1.936.775.043	201	%	33	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Pengadaan, Pemeliharaan dan Informasi Kepegawain ASN	Jumlah Penetapan dan Update Dokumen Kepegawain	3	Dokumen	1.028.908.238	1	Dokumen	307.814.869	1	Dokumen	149.730.908	0	Dokumen	60.815.335	1	Dokumen	27.292.597	0	Dokumen	36.927.449		1	Dokumen	125.035.381	2	Dokumen	432.850.250	67	%	42	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Penetapan Keputusan CPNS yang Sesuai dengan Kebutuhan	300	Keputusan	740.706.392	152	Keputusan	221.173.690	100	Keputusan	68.058.000	0	Keputusan	30.975.000	114	Keputusan	15.360.000	0	Keputusan	16.894.000		114	Keputusan	63.229.000	266	Keputusan	284.402.690	89	%	38	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Pengelolaan Data Kepegawain	Jumlah data ASN yang terpdate	2700	Data ASN	288.201.846	1596	Data ASN	86.641.179	2200	Data ASN	81.672.908	0	Data ASN	29.840.335	57	Data ASN	11.932.597	925	Data ASN	20.033.449		982	Data ASN	61.806.381	2578	Data ASN	148.447.560	95	%	52	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Penetapan Keputusan Dokumen Administrasi Kepegawain	3	Dokumen	2.155.864.361	1	Dokumen	490.677.944	1	Dokumen	575.228.002	0	Dokumen	36.801.620	1	Dokumen	121.294.728	1	Dokumen	42.007.180		1	Dokumen	200.103.528	2	Dokumen	690.781.472	67	%	32	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Penetapan Keputusan Penempatan PNS yang sesuai dengan Kebutuhan organisasi	75	Keputusan	241.777.411	177	Keputusan	40.597.900	25	Keputusan	32.247.000	4	Keputusan	0	16	Keputusan	25.462.200	27	Keputusan	5.875.400		47	Keputusan	31.337.600	224	Keputusan	71.935.500	299	%	30	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Penetapan Keputusan Kenaikan Pangkat PNS	600	Keputusan	359.274.406	439	Keputusan	118.620.434	200	Keputusan	84.568.432	0	Keputusan	28.895.322	80	Keputusan	21.599.728	237	Keputusan	17.047.580		317	Keputusan	67.542.630	756	Keputusan	186.163.064	126	%	52	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Penetapan Keputusan Penempatan Pejabat yang sesuai dengan Jumlah kebutuhan Organisasi	225	Keputusan	1.554.812.544	487	Keputusan	331.459.610	75	Keputusan	458.412.570	0	Keputusan	7.906.298	98	Keputusan	74.232.800	0	Keputusan	19.084.200		98	Keputusan	101.223.298	585	Keputusan	432.682.908	260	%	28	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pemberian bantuan pendidikan bagi PNS Tugas Belajar yang terpenuhi	100	%	2.278.277.000	100	Persen	497.290.454	100	Persen	513.696.000	0	Persen	11.891.081	0	Persen	0	25	Persen	60.100.000		25	Persen	71.991.081	125	Persen	569.281.535	125	%	25	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS Tugas Belajar yang mendapatkan bantuan pendidikan	24	Orang	2.278.277.000	9	Orang	497.290.454	8	Orang	513.696.000	0	Orang	11.891.081	0	Orang	0	2	Orang	60.100.000		2	Orang	71.991.081	11	Orang	569.281.535	46	%	25	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja dan pelanggaran disiplin	6	Dokumen	494.946.316	2	Dokumen	164.882.015	2	Dokumen	107.384.588	0	Dokumen	11.039.818	0	Dokumen	56.012.304	1	Dokumen	11.927.649		1	Dokumen	78.979.771	3	Dokumen	243.861.786	50	%	49	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang menyusun SOP dan mendapat penilaian kinerja	77	%	269.718.875	89	Persen	86.455.572	75	Persen	56.720.872	0	Persen	6.810.032	64,7	Persen	27.691.185	15,3	Persen	5.579.259		80	Persen	40.080.476	169	Persen	126.536.048	219	%	47	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penetapan keputusan peninjauan hukuman disiplin yang diterbitkan	6	Keputusan	225.227.441	3	Keputusan	78.426.443	2	Keputusan	50.663.716	0	Keputusan	4.229.786	0	Keputusan	28.321.119	0	Keputusan	6.348.390		0	Keputusan	38.899.295	3	Keputusan	117.325.738	50	%	52	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
3	Meningkatkan kualitas SDM ASN	Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase PNS yang memiliki kesesuaian dengan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	79	%	6.647.430.153	100	Persen	1.270.290.838	77	Persen	1.402.670.396	61	Persen	288.739.716	6	Persen	120.830.610	0	Persen	494.251.288		67	Persen	903.821.614	167	Persen	2.174.112.452	211	%	33	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase kebutuhan pengembangan kompetensi teknis bagi ASN yang terpenuhi	100	%	591.026.950	100	Persen	29.668.061	100	Persen	98.759.680	100	Persen	29.959.600	0	Persen	15.445.876	0	Persen	-		100	Persen	45.405.476	200	Persen	75.073.537	200	%	13	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Sertifikasi, Kembangan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN BKPSDM yang mengikuti kegiatan Diklat	32	Orang	591.026.950	28	Orang	29.668.061	10	Orang	98.759.680	18	Orang	29.959.600	0	Orang	15.445.876	0	Orang	-		18	Orang	45.405.476	46	Orang	75.073.537	144	%	13	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Jumlah waktu pelaksanaan diklat teknis yang diselenggarakan oleh BKPSDM	1	Kali		2	Kali		1	Kali		1	Kali		0	Kali		0	Kali			1	Kali		3	Kali		300	%			Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Sertifikasi, Kembangan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase PNS yang lulus mengikuti diklat pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100	%	6.056.403.203	100	Persen	1.240.622.777	100	Persen	1.303.910.716	22,22	Persen	258.780.116	11	Persen	105.384.734	0	Persen	494.251.288		33	Persen	858.416.138	133	Persen	2.099.038.915	133	%	35	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kembangan dan Tenaga Pembembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama,serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah PNS yang lulus mengikuti kegiatan Pelatihan Dasar CPNS	450	Orang	6.056.403.203	152	Orang	1.240.622.777	150	Orang	1.303.910.716	0	Orang	258.780.116	0	Orang	105.384.734	0	Orang	494.251.288		0	Orang	858.416.138	152	Orang	2.099.038.915	34	%	35	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Manajerial	45	Orang		13	Orang		1	Orang		0	Orang		0	Orang		0	Orang			0	Orang		13	Orang		29	%			Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional	1	Orang		1	Orang		15	Orang		10	Orang		5	Orang		0	Orang			15	Orang		16	Orang		1600	%			Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1		Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	4.710.648.330		100	Persen	4.710.648.330						100	Persen	4.608.650.139	100	Persen	4.608.650.139	100	%	98	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14	Bulan	3.047.626.553		14	Bulan	3.047.626.553						14	Bulan	3.003.292.723	14	Bulan	3.003.292.723	100	%	99	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Orang/bulan	3.047.626.553		30	Orang/bulan	3.047.626.553						30	Orang/bulan	3.003.292.723	30	Orang/bulan	3.003.292.723	100	%	99	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penunjang peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur yang tersedia	100	Persen	53.014.800		100	Persen	53.014.800						100	Persen	52.290.000	100	Persen	52.290.000	100	%	99	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2	Paket	53.014.800		2	Paket	53.014.800						2	Paket	52.290.000	2	Paket	52.290.000	100	%	99	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan pelayanan administrasi umum yang tersedia	100	Persen	455.949.188		100	Persen	455.949.188						100	Persen	444.181.147	100	Persen	444.181.147	100	%	97	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	17.560.224		1	Paket	17.560.224						1	Paket	17.482.000	1	Paket	17.482.000	100	%	100	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	105.996.302		1	Paket	105.996.302						1	Paket	105.705.053	1	Paket	105.705.053	100	%	100	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	31.560.000		1	Paket	31.560.000						1	Paket	31.294.000	1	Paket	31.294.000	100	%	99	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	45.167.662		1	Paket	45.167.662						1	Paket	44.983.100	1	Paket	44.983.100	100	%	100	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6	Dokumen	13.566.000		6	Dokumen	13.566.000						6	Dokumen	11.760.000	6	Dokumen	11.760.000	100	%	87	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan	242.099.000		100	Laporan	242.099.000						100	Laporan	232.956.994	100	Laporan	232.956.994	100	%	96	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang operasional perkantoran	100	Persen	442.338.212		100	Persen	442.338.212						100	Persen	422.162.548	100	Persen	422.162.548	100	%	95	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	163.243.212		10	Unit	163.243.212						10	Unit	143.825.547	10	Unit	143.825.547	100	%	88	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	224.000.000		1	Unit	224.000.000						1	Unit	223.242.001	1	Unit	223.242.001	100	%	100	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	55.095.000		3	Unit	55.095.000						3	Unit	55.095.000	3	Unit	55.095.000	100	%	100	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang operasional perkantoran yang tersedia	100	Persen	440.879.027		100	Persen	440.879.027						100	Persen	420.748.721	100	Persen	420.748.721	100	%	95	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan	5.500.000		2	Laporan	5.500.000						2	Laporan	4.828.000	2	Laporan	4.828.000	100	%	88	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	189.964.208		12	Laporan	189.964.208						12	Laporan	171.704.258	12	Laporan	171.704.258	100	%	90	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	245.414.819		12	Laporan	245.414.819						12	Laporan	244.216.463	12	Laporan	244.216.463	100	%	100	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang tersedia	100	Persen	270.840.550		100	Persen	270.840.550						100	Persen	265.975.000	100	Persen	265.975.000	100	%	98	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	Unit	88.980.000		20	Unit	88.980.000						20	Unit	84.449.000	20	Unit	84.449.000	100	%	95	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	9.325.000		4	Unit	9.325.000						4	Unit	9.320.000	4	Unit	9.320.000	100	%	100	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	104.625.000		1	Unit	104.625.000						1	Unit	104.584.000	1	Unit	104.584.000	100	%	100	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80	Unit	67.910.550		80	Unit	67.910.550						80	Unit	67.622.000	80	Unit	67.622.000	100	%	100	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
2	Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu	72	Persen	1.542.062.092		72	Persen	1.542.062.092						99,72	Persen	1.485.322.396	99,72	Persen	1.485.322.396	99,72	Persen	1.485.322.396	138,50	%	96	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Penetapan dan Update Dokumen Kepegawaian	1	Dokumen	197.468.236		1	Dokumen	197.468.236						1	Dokumen	181.417.513	1	Dokumen	181.417.513	100	%	92	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	100	Dokumen	101.143.640		100	Dokumen	101.143.640						114	Dokumen	90.729.000	114	Dokumen	90.729.000	100	%	90	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			

No	Sasaran	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5		6		7		8		8		9		10		11		12= 5+11		13=12/4x100%		11					
		Pengelolaan Data Kepegawain	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawain	2200	Dokumen	96.324.596		2200	Dokumen	96.324.596						2.150	Dokumen	90.688.513	2.150	Dokumen	90.688.513	2.150	Dokumen	90.688.513	98	%	94	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Penetapan Keputusan Dokumen Administrasi Kepegawain	1	Dokumen	756.552.260		1	Dokumen	756.552.260						1	Dokumen	721.045.707	1	Dokumen	721.045.707	1	Dokumen	721.045.707	100	%	95	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	25	Dokumen	32.247.000		25	Dokumen	32.247.000						75	Dokumen	31.337.600	75	Dokumen	31.337.600	75	Dokumen	31.337.600	100	%	97	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	200	Dokumen	110.980.120		200	Dokumen	110.980.120						317	Dokumen	104.136.070	317	Dokumen	104.136.070	317	Dokumen	104.136.070	100	%	94	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	75	Dokumen	613.325.140		75	Dokumen	613.325.140						253	Dokumen	585.572.037	253	Dokumen	585.572.037	253	Dokumen	585.572.037	100	%	95	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pemberian beasiswa pendidikan bagi PNS Tugas Belajar yang terpenuhi	100	Persen	423.266.000		100	Persen	423.266.000						100	Persen	419.747.750	100	Persen	419.747.750	100	Persen	419.747.750	100	%	99	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	7	Orang	423.266.000		7	Orang	423.266.000						7	Orang	419.747.750	7	Orang	419.747.750	7	Orang	419.747.750	100	%	99	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja dan pelanggaran disiplin	2	Dokumen	164.775.596		2	Dokumen	164.775.596						2	Dokumen	163.111.426	2	Dokumen	163.111.426	2	Dokumen	163.111.426	100	%	99	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2000	Dokumen	84.733.036		2000	Dokumen	84.733.036						2.420	Dokumen	83.179.677	2.420	Dokumen	83.179.677	2.420	Dokumen	83.179.677	100	%	98	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2	Laporan	80.042.560		2	Laporan	80.042.560						5	Laporan	79.931.749	5	Laporan	79.931.749	5	Laporan	79.931.749	100	%	100	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Meningkatkan kualitas SDM ASN	Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase PNS yang memiliki kesesuaian dengan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	77	Persen	945.794.520		77	Persen	945.794.520						100	Persen	937.275.054	100	Persen	937.275.054	100	Persen	937.275.054	129,87	%	99	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase kebutuhan pengembangan kompetensi teknis bag ASN yang terpenuhi	100	Persen	70.704.000		100	Persen	70.704.000						100	Persen	63.405.476	100	Persen	63.405.476	100	Persen	63.405.476	100	%	90	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2	Dokumen	70.704.000		2	Dokumen	70.704.000						2	Dokumen	63.405.476	2	Dokumen	63.405.476	2	Dokumen	63.405.476	100	%	90	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase PNS yang lulus mengikuti diklat pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100	Persen	875.090.520		100	Persen	875.090.520						100	Persen	873.869.578	100	Persen	873.869.578	100	Persen	873.869.578	100	%	100	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama,serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama	100	Dokumen	875.090.520		100	Dokumen	875.090.520						108	Dokumen	873.869.578	108	Dokumen	873.869.578	108	Dokumen	873.869.578	100	%	100	%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Rata-rata Capaian Kinerja (%)				38,06	1.230.899.106		31,56	1.370.511.327		10,72	1.814.568.313		42,45	7.031.247.589		122,79%	7.031.247.589												
Predikat Kinerja				Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Tinggi													

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Target serta Capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Lamandau sebagaimana Keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Lamandau Nomor : 800/509.a/VII/BKPSDM-2021 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Lamandau 2018-2023 dan Rancangan Akhir Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Lamandau Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut :

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BKPSDM KABUPATEN LAMANDAU

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn+1)	
1	Indeks Profesionalitas ASN	N/A	N/A	58	61	61	63	57,91	N/A	61	63	N/A
2	Persentase Aparatur yang menduduki jabatan struktural sesuai Standar Kompetensi Jabatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase ASN yang mengikuti Diklat dan Lulus dengan predikat memuaskan	N/A	N/A	78	80	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Persentase aparatur yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator yang sesuai standar kompetensi jabatan	N/A	N/A	60,75	82,25	N/A	N/A	86,88	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Persentase tingkat layanan administrasi kepegawaian	N/A	N/A	80	82	N/A	N/A	99	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	50	55	N/A	N/A	50	55	N/A
7	Indeks Kepuasan Pegawai	N/A	N/A	N/A	N/A	83	85	N/A	N/A	83	85	N/A

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024 dalam menjalankan kegiatannya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau Pada Tahun 2024 - 2026 memiliki tujuan Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN yang Baik dengan Sasaran Meningkatkan Pelaksanaan Manajemen ASN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

Berdasarkan Rancangan Akhir Renstra BKPSDM Kabupaten Lamandau 2024-2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka strategi yang diterapkan adalah :

- a. Peningkatan kualitas Pengembangan kinerja aparatur
- b. Penataan dan pemberdayaan aparatur yang sesuai dengan pemetaan
- c. Peningkatan kesejahteraan ASN
- d. Melakukan pembinaan disiplin ASN
- e. Peningkatan Kinerja Birokrasi dan Layanan Publik
- f. Penyelenggaraan sistem manajemen pengembangan karir aparatur berbasis merit dan kompetensi

Sedangkan Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi adalah :

- a. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan diklat dan pengembangan sumber daya manusia aparatur
- b. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui diklat Dasar
- c. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui diklat kepemimpinan
- d. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui diklat Teknis dan fungsi
- e. Pengembangan kompetensi dengan pemberian bantuan tugas belajar/Ikatan dinas dan Ijin Belajar
- f. Penerapan Kebijakan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berbasis Kinerja

- g. Meningkatkan pemahaman aturan kepegawaian dan penegakan norma, sanksi serta aturan kepegawaian yang berlaku
- h. Penyelenggaraan seleksi ASN dengan sistem CAT
- i. Pemberian Keputusan kepangkatan sesuai ketentuan & perundang-undangan
- j. Pelaksanaan Rekon data pegawai secara berkala
- k. Pengurusan administrasi kepegawaian selesai tepat waktu
- l. Pelaksanaan Seleksi kompetensi jabatan PNS

Secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lamandau melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga urusan pemerintahan fungsi penunjang di Kabupaten Lamandau. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Badan beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing – masing pegawai dengan baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau masih menghadapi permasalahan dan hambatan yang meliputi :

- a. Bidang Sekretariat

Belum Optimalnya kapasitas kelembagaan dikarenakan belum optimalnya dukungan SDM, fasilitas sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan manajemen aparatur sipil.

b. Bidang Pengembangan dan Kinerja Aparatur

Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan (kualifikasi) Aparatur dan pelatihan (kompetensi) aparatur baik struktural, fungsional maupun teknis dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan publik di karenakan keterbatasan anggaran dalam peningkatan SDM Aparatur dan belum optimalnya pemetaan kebutuhan aparatur berdasarkan kualifikasi dan kompetensi. Selain itu permasalahan yang lain adalah belum optimalnya pelaksanaan pembinaan aparatur dalam penerapan perundang-undangan dan peraturan kepegawaian dikarenakan kurang maksimalnya penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dalam rangka mewujudkan aparatur yang baik dan berkualitas.

c. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi

Promosi ASN ke dalam jabatan struktural belum sepenuhnya didasarkan pada kinerja aparatur dikarenakan belum adanya sistem pola karier yang jelas untuk dijadikan pedoman bagi pegawai melalui sistem karier berbasis kinerja. Selain itu belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dikarenakan belum terintegrasinya sistem database kepegawaian, yaitu database pada BKPSDM dengan database di masing-masing PD

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan penyesuaian struktur organisasi dengan Peraturan Daerah baru tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia. Peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan BKPSDM melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistem pengumpulan data kinerja dan kepegawaian dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh PD demi terciptanya database yang akurat dan *up to date* demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Berkoordinasi secara maksimal dengan Komisi Aparatur Sipil Negara dan MENPAN sehingga dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang benar. Dan Lebih fokus pada pelaksanaan pembinaan aparatur dalam penerapan perundang-undangan dan peraturan kepegawaian agar lebih maksimalnya penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dalam rangka mewujudkan aparatur yang baik dan berkualitas.

2.3.2 Tantangan dan Peluang

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi :

1. Perlu adanya peningkatan pemahaman, kesadaran dan kapasitas pelaku pembangunan khususnya sumber daya manusia ASN dalam penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
2. Pengawasan kepegawaian yang belum efektif dan efisien;
3. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi jabatan;

4. Biaya pengembangan sumber daya manusia ASN yang cukup tinggi guna mencapai ASN yang profesional;
5. Perencanaan dalam menentukan kebutuhan aparatur belum sepenuhnya dilakukan dengan baik, masih belum sesuai dengan rasio beban kerja dan kualifikasi jabatan dalam penerapan standar kompetensi.

b. **Peluang Pengembangan Pelayanan**

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi :

1. Penguatan kebijakan dan implementasi manajemen kinerja ASN;
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam manajemen ASN;
3. Penguatan kebijakan dan implementasi sistem promosi jabatan melalui lelang terbuka;
4. Dukungan yang besar dari pemangku kebijakan dalam meningkatkan Sistem Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan;
5. Peningkatan kebijakan pelatihan singkat dan tepat sasaran bagi ASN.

2.3.3 Isu-isu Penting

a. Isu Internal

1) Tugas Pokok dan Fungsi

- Terkait dengan kepegawaian, BKPSDM dituntut untuk lebih berperan besar dalam perumusan dan pelaksanaan pembinaan disiplin, kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan diklat serta kesejahteraan pegawai;

- Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah ;
- Pengkoordinasian pelaksanaan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ;
- Pembinaan pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan.
- Pemanfaatan teknologi informasi sebagai penerapan *e-government* sesuai dengan tuntutan jaman dan keterbukaan informasi yang dapat diakses publik.

2) Sumber Daya Manusia Aparatur

- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

3) Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamandau. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Lamandau menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan

kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarnya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.

b. Isu Eksternal

1) Perubahan Sistem Pemerintah Pusat

Terkait dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru Indonesia Periode 2024-2029 maka secara sistematis akan mempengaruhi kebijakan terkait dengan kepegawaian. Mengantisipasi dengan mengikuti secara kontinyu perkembangan-perkembangan yang terjadi pada pemerintah pusat terkait dengan kebijakan daerah.

2) Globalisasi

Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat.

3) Peraturan Perundang-Undangan

Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan *good governance* dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan *good governance* dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional , Provinsi dan Kabupaten Lamandau tahun 2024 yang terkait dengan tupoksi BKPSDM sebagai koordinator SOPD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi / Kabupaten
(1)	(2)
A	Nasional
1	Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2	Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan
3	Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
4	Penguatan daya saing usaha
5	Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
6	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
7	Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara
8	Pelaksanaan Pemilu 2024
B	Provinsi
1	Meningkatkan pembangunan industri yang ada berbasis 4.0
2	Memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara bijaksana dan berkelanjutan
3	Memaksimalkan pembangunan proyek strategis daerah dan strategis nasional di Kalteng
4	Mendorong peningkatan UMKM di Kalteng
5	Meningkatkan jaringan infrastruktur untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6	Meningkatkan kualitas SDM yang berkompeten dan berdaya saing
7	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pekerjaan penduduk

8	Mengembangkan sektor sosial budaya dan pariwisata di Kalteng
C	Kabupaten Lamandau
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara merata dan berkelanjutan yang menunjang konektivitas ekonomi daerah dan mitigasi bencana
2	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan berdaya saing
3	Peningkatan Kualitas SDM melalui pemerataan akses mutu pendidikan dan pelayanan Kesehatan
4	Peningkatan kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD dalam hal ini Renstra BKPSDM Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 yaitu :

- Tujuan
 - Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN yang Baik
- Sasaran
 - Meningkatkan Pelaksanaan Manajemen ASN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

**Hubungan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target
Renstra BKPSDM Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET CAPAIAN TAHUN 2026
1	Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN yang Baik	Meningkatkan Pelaksanaan Manajemen ASN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	50	55	60
			Indeks Profesionalitas ASN	61	63	65
			Indeks Kepuasan Pegawai	83	85	87

3.3 Program dan Kegiatan

BKPSDM telah merancang 3 program, 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan untuk tahun 2024 yang dapat dilihat pada matriks hasil *print out* dari penginputan program dan kegiatan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. LAMANDAU
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						6.930.382.332,00							6.821.187.661,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						6.930.382.332,00							6.821.187.661,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						5.871.382.422,00							5.799.082.861,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	-			100 %	4.270.735.474,00						-	4.192.833.649,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedianya	-			100 %	20.000.000,00			-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	20.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-		20.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN	-			100 %	3.047.349.020,00			-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	3.058.014.742,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	3.047.349.020,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-		3.058.014.742,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penunjang peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur yang tersedia	-			100 %	76.639.470,00			-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	76.907.708,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	44.200.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-		44.354.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				28 Orang	32.439.470,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-		32.553.008,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Kebutuhan pelayanan administrasi umum yang tersedia</i>	-			100 %	372.140.164,00			-	Peningkatan kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	373.442.654,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	8.452.908,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		8.482.493,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	105.534.040,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		105.903.409,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	30.560.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		30.666.960,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	50.755.216,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		50.932.859,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				5 Dokumen	12.366.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		12.409.281,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				100 Laporan	164.472.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		165.047.652,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang operasional perkantoran</i>	-			100 %	145.419.461,00			-	Peningkatan kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	52.684.068,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.419.461,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-		52.684.068,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	35.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang operasional perkantoran yang tersedia	-			100 %	444.206.809,00			-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	445.761.533,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	6.250.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-		6.271.875,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	215.127.980,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-		215.880.928,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	222.828.829,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-		223.608.730,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang tersedia	-			100 %	164.980.550,00			-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	165.522.944,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	88.980.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-		89.291.482,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				14 Unit	3.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-		3.009.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-		10.000.910,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				80 Unit	63.000.550,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-		63.221.052,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	<i>Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu</i>	-			100 %	1.600.646.948,00						-	1.606.249.212,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	<i>Jumlah Penetapan dan Update Dokumen Kepegawaian</i>	-			1 Dokumen	249.254.356,00			-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	250.126.746,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN</i>				1 Dokumen	108.211.760,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-		108.590.501,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian</i>				2800 Dokumen	141.042.596,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-		141.536.245,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	<i>Jumlah Penetapan Keputusan Dokumen Administrasi Kepegawaian</i>	-			1 Dokumen	726.353.316,00			-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	728.895.552,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah</i>				160 Dokumen	61.744.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-		61.960.104,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			<i>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>				550 Dokumen	84.598.120,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-		84.894.213,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN</i>				200 Dokumen	580.011.196,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-		582.041.235,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	<i>Persentase pemberian bantuan pendidikan bagi PNS Tugas Belajar yang terpenuhi</i>	-			100 %	502.514.000,00			-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	504.272.799,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan</i>				9 Orang	502.514.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-		504.272.799,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<i>Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja dan pelanggaran disiplin</i>	-			2 Dokumen	122.525.276,00			-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	122.954.115,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>				2100 Dokumen	59.880.716,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-		60.090.299,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														
			<i>Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa</i>				100 Orang	30.732.180,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-		30.839.743,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</i>				20 Laporan	31.912.380,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-		32.024.073,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1.058.999.910,00							1.022.104.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Dimensi Kompetensi Nilai Dimensi Kualifikasi Nilai Dimensi Disiplin Nilai Dimensi Kinerja	-			16,8 Nilai 15,7 Nilai 4,7 Nilai 23,8 Nilai	1.058.999.910,00						-	1.022.104.800,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase kebutuhan pengembangan kompetensi teknis bagi ASN yang terpenuhi	-			100 %	289.665.910,00			-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	290.679.741,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				15 Dokumen	289.665.910,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-		290.679.741,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase PNS yang lulus mengikuti diklat pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	-			100 %	769.334.000,00			-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	731.425.059,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama				120 Dokumen	769.334.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kualitas P elaksanaan Reformasi Birokrasi	-		731.425.059,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	J U M L A H							6.930.382.332,00							6.821.187.661,00	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

Program BKPSDM merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD, selanjutnya dijabarkan BKPSDM kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan BKPSDM. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamandau namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi Kalimantan Tengah, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif BKPSDM Kab. Lamandau Tahun 2024 dengan jumlah 3 program, 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.270.735.474,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.047.349.020,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.047.349.020,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.639.470,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	44.200.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	32.439.470,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	372.140.164,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.452.908,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.534.040,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.560.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.755.216,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.366.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.472.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	145.419.461,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.419.461,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	444.206.809,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.250.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.127.980,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	222.828.829,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.980.550,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.980.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.000.550,00
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.600.646.948,00
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	249.254.356,00
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	108.211.760,00
Pengelolaan Data Kepegawaian	141.042.596,00

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
Mutasi dan Promosi ASN	726.353.316,00
Pengelolaan Mutasi ASN	61.744.000,00
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	84.598.120,00
Pengelolaan Promosi ASN	580.011.196,00
Pengembangan Kompetensi ASN	502.514.000,00
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	502.514.000,00
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	122.525.276,00
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	59.880.716,00
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	30.732.180,00
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	31.912.380,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.058.999.910,00
Pengembangan Kompetensi Teknis	289.665.910,00
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	289.665.910,00
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	769.334.000,00
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	769.334.000,00
TOTAL	6.930.382.332,00

BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Renja BKPSDM Kabupaten Lamandau Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas Kalimantan Tengah maupun nasional. Rancangan Akhir Renja PD ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi BKPSDM Kabupaten Lamandau dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2024.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Rancangan Akhir Renja PD setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan *feedback* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada;

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Rancangan Akhir Renja BKPSDM Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024. Pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada BKPSDM Kabupaten Lamandau dengan harapan perencanaan dan penganggaran yang telah disusun dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau.

Nanga Bulik, September 2023
Kepala BKPSDM Kabupaten Lamandau,



KAMINIANTHUS
NIP. 19800612 200312 1 007